



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 147 /SEK/KU.00/03/2018 21 Maret 2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Permintaan Data dan Konfirmasi Saldo Keuangan Perkara

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
Di Seluruh Indonesia

Berkaitan dengan adanya kewajiban pengungkapan pengelolaan keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2017 dan berdasarkan surat Ketua Tim BPK Nomor : 04/LK-MA/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 hal seperti pada pokok surat, dengan ini diminta kepada Saudara untuk memenuhi empat formulir terlampir dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani.

Selanjutnya Para Direktur Jenderal Badan Peradilan untuk meneruskan, menghimpun, memverifikasi data keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya dari seluruh satuan kerja dibawahnya sesuai dokumen sumber, dan melaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung RI untuk direkapitulasi sebagai bahan pengungkapan penting lainnya dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2017 (*Audited*) guna mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas dan handal bebas dari kekurangan penyajian, serta dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, data/formulir diatas dapat menghubungi sebagai berikut :

No	Eselon	Nama	HP	Email
1.	Kepaniteraan	Mutia Widyawati, SE, MM	081293274011	evlapkeu.sekpan@gmail.com
2.	Ditjen. Badilum	A. Basyari, SH	081387111212	konsinyasi.badilum@gmail.com
3.	Ditjen. Badilag	Pebri Tripeni	081383428253	aklap.badilag@gmail.com
4.	Ditjen. Badilmiltun	Yuda Aji Wibowo, SH	082210105060	keuangan.ditjenmiltun@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia

A.S. PUDJCHARSOYO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 21 Maret 2018

Nomor : 04/LK-MA/03/2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Data dan Konfirmasi Saldo Keuangan
Perkara

Yth.

Sekretaris Mahkamah Agung
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Mahkamah Agung sesuai Surat Tugas No. 8/ST/V-XVI.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, kami membutuhkan data dan konfirmasi terkait mutasi dan rincian saldo akhir keuangan perkara yang dikelola oleh badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung untuk meyakini saldo Uang Titipan Pihak Ketiga/Keuangan Perkara yang akan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2017.

Data dan hasil konfirmasi dari masing-masing satker dapat dimuat dalam empat formulir terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data rincian mutasi pembentuk saldo akhir keuangan perkara per satker per 31 Desember 2017 berdasarkan dokumen sumber (rekening koran Januari – Desember 2017, Berita Acara Penutupan Kas Tahun 2017, dan BKU/pembukuan Bendahara Biaya Proses) dengan mengisikan saldo awal per 1 Januari dan tambah/kurang dengan penerimaan/pengeluaran biaya pada kolom yang tersedia dalam formulir pada **Lampiran 1**. Saldo akhir berdasarkan mutasi penerimaan/pengeluaran tersebut dirinci lebih lanjut dengan nilai saldo akhir di bank dan brankas per 31 Desember 2017.
2. Konfirmasi atas nilai saldo awal per 1 Januari 2017 per masing-masing eselon I yang didapatkan pada **Lampiran 1** dibandingkan dengan nilai saldo akhir per 31 Desember 2016 berdasarkan LK MA Tahun 2016 (*audited*) dengan mengisikan pada formulir **Lampiran 2**, serta memberikan penjelasan apabila ditemukan selisih.
3. Rincian saldo akhir per 31 Desember 2017 pada bank dan brankas per satker yang didapatkan pada **Lampiran 1** dirinci dan diidentifikasi ke masing-masing biaya perkara, biaya eksekusi, konsinyasi, uang titipan perkara pidana, PHI, jasa giro/bunga, pajak, dan uang pihak ketiga lainnya dengan mengisikan pada formulir **Lampiran 3**, serta melampirkan:
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen pendukung penerimaan uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI dari para pihak kepada pengadilan. File dikirimkan dalam bentuk pdf.
 - b. BAST atau dokumen pendukung penyerahan/pengeluaran/pengembalian uang konsinyasi uang titipan perkara pidana, dan PHI dari pengadilan kepada para pihak. File dikirimkan dalam bentuk pdf.

4. Rincian penyetoran dan posisi jasa giro rekening keuangan perkara per satker pada Tahun 2017 sesuai formulir pada **Lampiran 4**, serta melampirkan rekening koran (pada akhir bulan setiap bulan) yang menunjukkan jasa giro yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2017. Nilai jasa giro/bunga dan pajak pada rincian tersebut harus sama dengan rincian pada **Lampiran 3**.

Data dan hasil konfirmasi dalam empat formulir tersebut kami harapkan dapat dikirimkan dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan dalam bentuk *excel* terkompilasi di tingkat eselon I terkait untuk kemudian diserahkan secara keseluruhan kepada tim BPK. Mengingat pentingnya dokumen tersebut dan keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan dokumen dapat kami terima paling lambat hari Rabu tanggal **28 Maret 2018**.

Demikianlah pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Tim,



Rici Ricarfi Kurnia
NIP 19800613 200312 1 001

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
3. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5. Penanggung Jawab
6. Pengendali Teknis

Rincian Mutasi Pembentuk Saldo Akhir Keuangan Perkara per Satker di Lingkungan Mahkamah Agung per 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No.	Eselon I	No.	Kode Satker	Satker	Saldo di Bank dan Brankas Tahun 2017							Selisih Saldo Akhir	Penjelasan Selisih
					Saldo Awal (1 Jan 2017)	Penerimaan	Penggunaan	Saldo Akhir (31 Des 2017)	Saldo di Bank (31 Des 2017)	Saldo di Brankas (31 Des 2017)	cek Saldo Akhir (31 Des 2017)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i = f+g-h	j	k	l = i+k	m = l-i	n
A.	Kepaniteraan												
	Jumlah	1											
		2											
		dst											
C.	Jumlah	1											
		2											
		dst											
D.	Jumlah	1											
		2											
		dst											
	Jumlah												
	TOTAL												

Keterangan:

1. Isian formulir berdasarkan dokumen sumber (Rekening Koran Jan-Des 2017, Berita Acara Penutupan Kas Jan-Des 2017, BKU Bendahara Biaya Proses)
2. Saldo akhir di kolom i harus sama dengan saldo akhir di kolom l, jika selisih jelaskan.

Jakarta, Maret 2018
Mengetahui,
Panitera/Direksi

(.....)
NIP.

**Konfirmasi Nilai Saldo Awal Keuangan Perkara per Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung
Tahun 2017**

(dalam Rupiah)

No.	Eselon I	Saldo Akhir Tahun 2016 (Audited)						Saldo Awal Tahun 2017 (Dokumen Sumber)	Selisih Saldo Awal	Penjelasan Selisih
		Biaya Perkara	Biaya Eksekusi	Biaya Konsinyasi	Uang Titipan Perkara Pidana	PHI	Jumlah			
a	b	c	d	e	f	g	h=c+d+e+f+g	j=h-i	k	
1.	Kepaniteraan	37.914.880.114	-	-	-	-	37.914.880.114			
2.	Dijten Badilum	81.305.906.687	89.492.774.753	1.347.649.365.951	31.965.799.719	5.715.623.497	1.556.129.470.608			
3.	Dijten Badilag	41.397.557.279	2.850.103.570	15.195.750.264	-	-	59.443.411.113			
4.	Dijten Badimiltun	2.300.604.209	27.983.000	-	-	-	2.328.587.209			
	Total						1.655.816.349.043			

↑
 Nilai saldo awal
 berdasarkan
 rekapitulasi pada
 Lampiran 1

Keterangan:

1. Saldo akhir tahun 2016 berdasarkan LK MA Tahun 2016 (Audited)

Jakarta, Maret 2018
 Mengetahui,
 Panitera/Dirjen

(.....)
 NIP.

Rincian Saldo Akhir Keuangan Perkara per Satker di Lingkungan Mahkamah Agung per 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No.	Eselon I	No.	Kode Satker	Satker	Saldo Akhir (31 Des 2017) di Bank dan Brankas							Jumlah	
					Biaya Perkara	Biaya Eksekusi	Konsinyasi	Uang Titipan Perkara Pidana	PHI	Jasa Giro/Bunga	Pajak		Uang Pihak Ketiga Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n=f+g+h+i+j+k+l+m
A.	Kepaniteraan												
	Jumlah	1											
		2											
		dst											
B.	Dijten Badilum												
	Jumlah	1											
		2											
		dst											
C.	Dijten Badilag												
	Jumlah	1											
		2											
		dst											
D.	Dijten Badilmitum												
	Jumlah	1											
		2											
		dst											
	Jumlah												
	TOTAL												



Saldo akhir 31 Des 2017 harus sama dengan saldo akhir di Lampiran 1 (kolom i dan l)

Keterangan:

- Lampirkan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen pendukung penerimaan uang konsinyasi, uang titipan perkara pidana, dan PHI dari para pihak kepada pengadilan. File dikirimkan dalam bentuk pdf
- Lampirkan dengan BAST atau dokumen pendukung penyerahan/pengeluaran uang konsinyasi dari pengadilan kepada para pihak. File dikirimkan dalam bentuk pdf.

Jakarta, Maret 2018
Mengetahui,
Panitera/Dirjen

(.....)
NIP.

